

STRATEGI PEMBIAYAAN PESANTREN MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Rony Edward Utama

Program Doctoral, Prodi MPI, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: r.edwardutama@umj.ac.id

Diterima: 28 Agustus 2020

Direvisi: 25 September 2020

Disetujui: 23 Oktober 2020

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah upaya podok pesantren untuk mendapatkan sumber dana dan optimalisasi pengelolaan dana pondok pesantren agar bisa menjaga kelangsungan dan pengembangannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis diskriptif dengan mengedepankan kajian pustaka (*library research*). Saat ini lembaga pendidikan Islam terutama khususnya pondok pesantren perlu mendapatkan perhatian dalam manajemen pembiayaan kegiataannya, penerimaan dari siswa, bantuan pemerintah ataupun donasi jamaah tidak bisa diandalkan selamanya, perlu dikembangkan strategi pembiayaan pesantren melalui pemberdayaan ekonomi umat karena prospek penyelenggaraan dan pengembangan pesantren cukup berpeluang besar menjadi pilihan utama orangtua dalam menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan ilmu, pendidikan agama dan wawasan bersosialisasi dengan sesama manusia serta pengalaman berwirausaha. Hasil penelitian bahwa perbaikan-perbaikan manajerial perlu dilakukan untuk pondok pesantren, melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki termasuk potensi ekonomi umat yang berada disekitar pesantren atau pun orangtua siswa sehingga proses yang berkelanjutan dari siswa junior, senior dan alumninya mampu mengembangkan potensi-potensi yang baru akibat strategi pemberdayaan ekonomi umat tersebut, terlebih bantuan dari pemerintah.

Kata Kunci : Pesantren, Stategi Pembiayaan dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat

ABSTRACT

The purpose of this research is the efforts of pesantren podok to obtain funding sources and optimize the management of pesantren funds in order to maintain their continuity and development. The method in this research uses a qualitative approach, with descriptive analysis method by promoting library research. Currently Islamic education institutions, especially Islamic boarding schools, need to get attention in the management of financing their activities, acceptance from students, government assistance or congregational donations cannot be relied on forever, it is necessary to develop a pesantren financing strategy through economic empowerment of the ummah because the prospect of organizing and developing the pesantren is quite large the main choice of parents in sending their children to school to gain knowledge, religious education and insight into socializing with fellow humans as well as entrepreneurial experience. The results of the research show that managerial improvements need to be made for Islamic boarding schools, through optimizing the available resources including the economic potential of the ummah around the pesantren or their parents so that the continuous process of junior, senior and alumni students is able to develop new potentials as a result of economic empowerment strategy for the people, especially assistance from the government.

Keywords: *Islamic boarding schools, financial strategies and economic empowerment of the ummah*

PENDAHULUAN

Secara historis, pesantren telah mendokumentasikan berbagai sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran Islam, pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi halayak nusantara tentang arti penting agama dan pendidikan. Artinya, sejak itu orang mulai memahami bahwa dalam rangka penyempurnaan keberagamaan, mutlak diperlukan prosesi pendalaman dan pengkajian secara matang pengetahuan agama mereka di pesantren.

Sejak awal pertumbuhannya, fungsi utama pesantren adalah menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam atau lebih dikenal tafaqquh fil al-din, yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia dan melakukan dakwah menyebarkan agama Islam serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak. Sejalan dengan fungsi tersebut, materi yang diajarkan dalam pondok pesantren semuanya terdiri dari materi agama yang diambil dari kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab atau lebih dikenal dengan kitab kuning.

Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren, ada 3 faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya yaitu, manajemen sebagai faktor upaya, organisasi sebagai factor sarana, dan administrasi sebagai faktor karsa (Baharuddin & Makin, 2010). Ketiga faktor ini memberi arah dan perpaduan dalam merumuskan, mengendalikan, penyelenggaraan, mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan kebijakan dalam usaha menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan tujuan setiap pondok pesantren.

Untuk melaksanakan program pondok pesantren, tentu perlu adanya manajemen sumber dana dan pengalokasian yang jelas sebagai upaya agar kebijakan yang dikeluarkan oleh kementiran agama dapat

diturunkan menjadi suatu program yang baik. Manajemen keuangan pondok pesantren merupakan hal yang penting dalam manajemen organisasi lembaga pendidikan yang akan menentukan kelancaran kegiatan pondok pesantren. Seperti halnya yang terjadi pada substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan pondok pesantren seharusnya dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan berupa kegiatan memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban.

Para pengambil kebijakan pondok pesantren selain harus memahami mekanisme aturan anggaran pendapatan dan pembelanjaan pondok pesantren, sitematika pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan baik kepada pengasuh, biro keuangan, maupun badan pemeriksa keuangan sebagai badan pengaudit internal pondok pesantren. Pengurus pesantren juga hendaknya harus memahami prinsip-prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan formal yang digambarkan dalam undang-undang No 20 Tahun 2003. Pada pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Juga harus memandang dan memberi tekanan pada prinsip-prinsip efektivitas.

Dalam dunia pendidikan, manajemen diperlukan dalam upaya terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna; terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara; tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan;

teratasinya masalah mutu pendidikan, karena 80% masalah mutu pendidikan disebabkan oleh manajemennya; dan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen strategi merupakan suatu proses yang dinamik karena ia berlangsung secara terus- menerus dalam suatu organisasi.

Konsep manajemen strategi yakni membicarakan hubungan antara organisasi dan ruang lingkungannya, lingkungan internal dan eksternal, memberi petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan sehingga organisasi tetap eksis dan mampu mengendalikan arah perjalanan organisasi menuju sasaran yang dikehendaki.

Dalam hal ini, Pondok Pesantren perlu lebih mengoptimalkan manajemen strategi agar dapat menghadapi setiap permasalahan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan menitikberatkan pada ilmu-ilmu syar'iyah (syariat Islam), sehingga menghasilkan santri yang tafaquh fiddiin (mendalami ilmu agama), dan mencetak huffadzul Qur'an (penghafal al-Qur'an) yang mampu mengaktualisasikan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Pengoptimalisasian yang dimaksud adalah cara agar proses manajemen strategi dapat terarah dan terstruktur dalam mencapai visi misi serta tujuan dari pondok pesantren. Mulai dari tahap perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, hingga tahap penilaian strategi atau evaluasi strategi.

Pondok Pesantren (PonPes) Annajiyah, sangat mengharapkan pemberdayaan umat dalam hal pendanaan agar bisa berlanjut kehidupannya. PonPes ini sangat membantu lingkungan khususnya dalam hal peningkatan pengetahuan agama, selain sebagai sarana bagi anak-anak untuk mendapatkan ilmu yang sifatnya seperti pendidikan madrasah maupun tambahan pengetahuan agama Islam

Dengan kekuatan yang dimilikinya, pesantren mempunyai potensi untuk melakukan pemberdayaan umat terutama dalam bidang ekonomi. Karena melakukan

pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk dakwah bil hal dan sekaligus mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dimilikinya secara kongkrit (aplikatif). Di dalam Islam, ekonomi merupakan wasilah bukan maqashid, jadi ekonomi merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sesuai dengan yang di ajarkan Islam bahwasanya harta dan kegiatan ekonomi merupakan amanah dari Allah SWT sebagai pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta benda, pemilik hakiki kekayaan. Karena itulah orang yang beriman diperintahkan untuk meningkatkan dan menambah harta mereka melalui jalan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti dengan cara sedekah bukan dengan cara ribawi karena sedekah akan meningkatkan efek positif pada harta kekayaan.

Konsep Islam tersebut seharusnya dijadikan dasar oleh pesantren untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, membimbing dan mendampingi umat. Dengan demikian status harta secara de jure yang menjadi milik manusia mengakibatkan adanya hubungan antara manusia dan Allah memiliki beberapa implikasi. Dari sini sebenarnya pesantren mempunyai kekuatan yang bisa dimanfaatkan pesantren untuk melakukan pemberdayaan dalam ekonomi kerakyatan. Pesantren yang secara langsung bersentuhan dengan umat bisa menjadi media pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Perumusan Masalah :

1. Bagaimana pendanaan Pesantren dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatannya ?
2. Bagaimana Pemerintah membantu Pesantren dalam pembiayaan kegiatannya ?
3. Apa yang terjadi dalam manajemen Pesantren dalam pengelolaan pembiayaannya ?
4. Bagaimana strategi Pesantren dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat ?
5. Apa yang dilakukan pesantren dalam mendidik atau membina

santrinya dikegiatan pemberdayaan ekonomi umat ?

LITERATURE REVIEW

1. Fungsi Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara khusus mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari, bahkan lembaga pendidikan ini menjadi tempat untuk mempersiapkan kader-kader agama di masa yang akan datang. Seperti pernyataan Azyumardi Azra, pondok pesantren mempunyai fungsi besar dalam pendidikan Islam, yakni: 1) transmisi dan tranfer ilmu-ilmu Islam, 2) pemeliharaan tradisi Islam, dan 3) produksi ulama.

Depag menyatakan bahwa ada 3 faktor yang berperan dalam sistem penyelenggaraan pondok pesantren, yaitu: 1) manajemen sebagai faktor upaya, 2) organisasi sebagai faktor sarana, dan 3) administrasi sebagai faktor kuasa. Oleh karena itu keberadaan faktor-faktor ini memberikan arah perpaduan dalam merumuskan, mengendalikan penyelenggaraan, mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam usaha menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pendidikan pondok pesantren.

Penerapan otonomi daerah yang diikuti dengan penerapan otonomi pada lembaga pendidikan merupakan kesempatan pada masing-masing lembaga pendidikan untuk memajukan lembaganya termasuk pondok pesantren karena dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dinyatakan bahwa:

- 1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan agama berfungsi mempersiapkan peserta didik

menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.

- 2) Pendidikan agama dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.
- 3) Pendidikan keagamaan berbentuk ajaran diniyah pesantren, pasraman, samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- 4) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (SISDIKNAS, 2003).

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan pondok pesantren harus melakukan inovasi-inovasi dalam lembaga, karena dalam konteks otonomi pendidikan, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai kemandirian yang sangat kuat terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana pondok pesantren.

2. Sistem Pendidikan di Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman, terutama adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan bentuk pesantren bukan berarti pesantren kehilangan ciri khasnya. Sistem pesantren adalah sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren.

Secara faktual, pesantren dapat dipolakan pada dua tipe atau pola, yaitu berdasarkan bangunan fisik dan berdasarkan kurikulum.

i. Tipe pesantren berdasarkan bangunan fisik. Berdasarkan bangunan fisik atau sarana pendidikan yang dimiliki, pesantren mempunyai lima tipe, yaitu:

Tabel 1 Tipe Pesantren Berdasarkan Bangunan Fisik

Tipe	Keterangan
Tipe I: ❖ Masjid ❖ Rumah Kyai	Pesantren ini masih bersifat sederhana, di mana kyai menggunakan masjid atau rumahnya sendiri untuk mengajar. Tipe ini santri hanya datang dari daerah pesantren ini sendiri, namun mereka telah mempelajari agama secara kontinyu dan sistematis. Metode pengajaran: <i>wetonan</i> dan <i>sorongan</i> .
Tipe II: ❖ Masjid ❖ Rumah Kyai ❖ Pondok/Asrama	Tipe pesantren ini telah memiliki pondok atau asrama yang disediakan bagi santri yang datang daerah di luar pesantren. Metode pengajaran: <i>wetonan</i> dan <i>sorongan</i> .
Tipe III: ❖ Masjid ❖ Rumah Kyai ❖ Pondok/Asrama ❖ Madrasah	Pesantren ini telah memakai sistem klasikal, santri yang tinggal di pesantren mendapat pendidikan di madrasah. Adakalanya santri madrasah itu datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Di samping sistem klasikal, kyai memberikan pengajian dengan sistem <i>wetonan</i> .
Tipe IV: ❖ Masjid ❖ Rumah Kyai ❖ Pondok/Asrama ❖ Madrasah ❖ Tempat Keterampilan	Dalam tipe ini di samping memiliki madrasah, juga memiliki tempat-tempat keterampilan. Misalnya: peternakan, pertanian, tata busana, tata boga, toko, koperasi, dan sebagainya.
Tipe V: ❖ Masjid ❖ Rumah Kyai ❖ Pondok/Asrama ❖ Madrasah ❖ Tempat Keterampilan ❖ Perguruan Tinggi ❖ Gedung Pertemuan ❖ Tempat Olahraga ❖ Sekolah Umum	Tipe pesantren ini sudah berkembang dan bisa digolongkan pesantren mandiri. Pesantren ini seperti ini telah memiliki perpustakaan, dapur umum, ruang makan, rumah penginapan tamu, dan sebagainya. Di samping itu pesantren ini mengelola SMP, SMA dan SMK.

ii. Tipe pesantren berdasarkan kurikulum. Berdasarkan kurikulum atau sistem pendidikan yang dipakai, pesantren mempunyai tiga tipe, yaitu:

1) Pesantren Tradisional (salāf)

Pesantren ini masih mempertahankan bentuk aslinya dengan mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke-15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem h{alaqah} atau mangaji tudang yang dilaksanakan di masjid. Hakikat dari sistem pengajaran h{alaqah} ini adalah penghapalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung kepada terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu. Artinya ilmu tidak berkembang ke arah paripurnanya ilmu itu, melainkan hanya terbatas pada apa yang diberikan kyai. Kurikulum sepenuhnya ditentukan oleh para kyai pengasuh pondok.

2) Pesantren Modern (khalaf atau as{ri)

Pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar klasikal dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Penerapan sistem belajar modern ini terutama tampak pada penggunaan kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional.⁴⁶ Kedudukan para kyai sebagai koordinator pelaksana proses pembelajaran dan sebagai pengajar di kelas. Perbedaannya dengan sekolah dan madrasah terletak pada porsi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab lebih menonjol sebagai kurikulum lokal.

3) Pesantren Komprehensif.

Tipe pesantren ini merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara tradisional dan modern. Pendidikan diterapkan dengan pengajaran kitab kuning dengan metode sorongan, bandongan dan wetonan yang biasanya diajarkan pada malam hari sesudah salat Magrib dan sesudah salat Subuh. Proses pembelajaran sistem klasikal dilaksanakan pada pagi sampai siang hari seperti di madrasah/sekolah pada umumnya.

Ketiga tipe pesantren tersebut memberikan gambaran bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berjalan dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dimensi kegiatan sistem pendidikan dilaksanakan oleh pesantren bermuara pada sasaran utama yaitu perubahan baik secara individual maupun kolektif. Perubahan itu berwujud pada peningkatan persepsi terhadap agama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Santri juga dibekali dengan pengalaman dan keterampilan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.

Ada beberapa ciri umum dimiliki pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal terlibat dalam pengembangan masyarakat. Zamakhsyari Dhofier mengajukan lima unsur yang merupakan elemen pesantren, yaitu pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kyai.

3. Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Pemberdayaan ekonomi ummat adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian ummat baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan ketrampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan ketrampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain).

Di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan yang dilaksanakan pemerintah menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.

Penguasa memiliki akses yang lebih besar untuk menguasai kegiatan-kegiatan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi banyak pihak dalam masyarakat. Hal-hal di atas akhirnya memunculkan dikotomi, yang membedakan antara masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang dikuasai. Untuk membebaskan masyarakat dari situasi ini, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless). Ini adalah alasan awal mengapa pemberdayaan dinilai penting untuk dilakukan.

Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata “power” yang berarti “kekuasaan” atau “keberdayaan”. Karenanya ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki pihak pertama untuk membuat pihak ke-dua melakukan apa yang diinginkan pihak pertama, terlepas dari keinginan dan minat pihak ke-dua. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (freedom); (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan; dan (c) berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan. Para ahli mengemukakan bahwa bahasan mengenai pemberdayaan hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan yang meliputi.

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.

- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi adalah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah (kondisi ekonominya) dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai, dan konsep mengenai tujuan pemberdayaan ini seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Bila konsep pemberdayaan di atas dilekatkan mendahului konsep ekonomi, maka didapati konsep baru yang lebih sempit dan spesifik. Pemberdayaan ekonomi merupakan kegiatan memberi kekuasaan pada pihak ke-dua (sasaran pemberdayaan) agar menjadi mampu dalam bidang ekonomi.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah upaya podok pesantren untuk mendapatkan sumber dana dan optimalisasi pengelolaan dana pondok pesantren agar bisa menjaga kelangsungan dan pengembangannya. Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren (PonPes) Annajiyah, Jl PLN No.29, Podok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis diskriptif dengan metode kajian pustaka (*library research*).

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Pesantren

a. Doktrin Keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi manusia, baik di dalam masalah keduniaan maupun masalah ibadah dengan Tuhan. Dalam segi

muamalah (hubungan keduniawian) agama-agama samawi telah mengatur umatnya, baik yang berhubungan antar manusia dalam bidang pemerintahan, hukum, kemasyarakatan, maupun persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi. Pada bidang ekonomi, para ilmuwan telah mengadakan suatu penelitian secara mendalam hubungan agama dan ekonomi, yang salah satu pokok penelitiannya adalah, adakah kontribusi agama terhadap semangat ekonomi pada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Kenneth Boulding, di dalam penelitiannya tentang pengaruh agama Kristen protestan terhadap semangat ekonomi, ia menemukan bahwa pengaruh agama protestan ternyata mempunyai dampak terhadap kehidupan ekonomi dan sejarah, bahkan lebih besar daripada pengaruh agama terhadap pemikiran ekonomi saja. Agama turut mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai jenis komoditi yang diproduksi, terbentuknya kelembagaan ekonomi dan tentu juga praktek-praktek atau perilaku ekonomi.

Pendapat di atas diperkuat oleh Tesis Max Weber yang membuktikan bahwa agama, dalam hal ini etik protestanisme, turut memberi saham terhadap perkembangan kapitalisme dan revolusi industri. Weber mengatakan bahwa Protestan berbeda dengan Katolik seperti yang diajukan oleh Aquino yang melihat kerja sebagai keharusan dan kelanjutan hidup. Maka Calvinisme yang merupakan salah satu paham dalam protestan, terutama sekte Puritanisme melihat kerja sebagai Beruf (panggilan). Kerja tidaklah sekedar pemenuhan keperluan tetapi merupakan tugas suci. Pensucian kerja (atau perlakuan terhadap kerja sebagai usaha keagamaan yang akan menjamin kepastian dalam diri akan keselamatan), berarti mengingkari sikap hidup keagamaan yang melarikan diri dari dunia. Sikap hidup keagamaan yang diinginkan oleh doktrin ini, kata Weber, ialah askes duniawi, yaitu intensifikasi pengabdian agama yang dijalankan dalam kegairahan kerja sebagai gambaran dan pernyataan dari manusia yang terpilih. Dalam kerangka pemikiran teologi seperti

ini, maka semangat kapitalisme, yang bersandarkan kepada cita ketekunan, hemat, berperhitungan, rasional, dan sanggup menahan diri menemukan pasangannya. Sukses hidup yang dihasilkan oleh kerja keras bisa pula dianggap sebagai pembenaran bahwa ia, si pemeluk, adalah orang yang terpilih.

Tesis Weber di atas membuktikan bahwa agama dalam hal ini etik protestanisme, turut memberi saham terhadap perkembangan kapitalisme dan revolusi industri, menarik perhatian luas. Seperti Tawney, Robert N. Bellah, berusaha mencari pola hubungan yang serupa antara agama Tokugawa dan kebangkitan Kapitalisme Jepang. Karl Max, dalam membahas berbagai aspek ekonomi, juga tidak lupa melihat agama, sebagai bangunan atas yang merupakan refleksi dari mode produksi.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai etika agama mempunyai peranan yang kuat untuk menggerakkan semangat ekonomi seperti yang digambarkan Weber dalam bukunya *The Protestant Ethic and the spirit of capitalism*. Sekarang bagaimanakah dengan Islam. Di dalam Islam sebenarnya masalah perekonomian – yang masuk kategori urusan keduniaan (muamalah) - mempunyai bobot yang besar dalam agama, tidak hanya sekedar suplemen sebagaimana anggapan umum selama ini. Islam mengajarkan keseimbangan antara orientasi kehidupan dunia dan akhirat. Walau demikian, Islam yang mengajarkan etika kehidupan agar di dalam memperoleh harta tetap menjaga perbuatan kebaikan terhadap orang atau menjaga hak-hak asasi orang lain; tidak serakah, tidak dengan merampas hak orang lain, tidak zalim, dan tidak merugikan orang lain.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak

individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat.

Untuk meningkatkan perekonomian Islam memberikan motivasi pada pemeluknya untuk bekerja keras dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Karena Islam pada hakekatnya adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spiritual. Anjuran tersebut paling tidak tercermin dalam dua dari lima rukun Islam yaitu zakat dan haji. Kedua pelaksanaan rukun Islam ini mensyaratkan adanya kekayaan atau kecukupan yang bersifat material. Jika pelaksanaan zakat dan ibadah haji memerlukan kecukupan material itu, lantas mencari materi menjadi wajib hukumnya. Dengan kata lain, rukun Islam mewajibkan umatnya untuk berkecukupan secara material. Nabi sendiri juga menegaskan bahwa *al-yad al-ulya khairun min al-yad as-sufla*, “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”, atau memberi lebih baik daripada meminta.

Al-Qur’an juga yang menjelaskan untuk bekerja keras dan mengajarkan pentingnya umat Islam untuk bekerja dan memikirkan ekonominya. Di antaranya QS. Al-Qashash [28]: 77: “Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu [kebahagiaan] negeri akhirat; dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari [kenikmatan] duniawi. Berbuat baiklah [kepada orang lain] sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi”. Dalam tafsir al-Jalalayn, ayat tersebut ditafsirkan; “Perolehlah [untuk] kepentingan akhirat [harta kekayaan] yang telah Allah berikan kepadamu, dengan cara menginfakkan [sebagian] harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Dan jangan kamu lupakan bagian kamu yang berkaitan dengan keduniaan untuk menjadi amal akhirat”

Juga dalam QS. Al-Jumu’ah [62]: 10: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi

dan carilah karunia Allah (yakni rizqi/harta) dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Islam mendorong orang untuk bekerja. Hadits yang berbunyi: “*Asyaddu an-nas adzabun yauma al-qiyamah al-maghfiy al-bathil* (siksaan paling berat pada hari kiamat, adalah bagi orang yang hanya mau dicukupi orang lain dan hidup menganggur)”.

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam tidak menginginkan umatnya berada dalam kemiskinan. Karena akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial bisa menyebabkan munculnya penyimpangan akidah. Pendapat ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : “Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran” (HR. Abu Na’im dari Anas). Kemiskinan juga bisa menyebabkan orang tergelincir dalam akhlak dan moralitas yang tercela. Karena suara perut dapat mengalahkan suara nurani. Lilitan kesengsaraan pun bisa mengakibatkan seseorang meragukan nilai-nilai akhlak dan agama.

Manusia sebagai subyek ekonomi, yang dalam kelompok besar disebut umat, oleh Islam dibebani (*mukallaf*) untuk berikhtiar sesuai dengan kadar potensinya. Taklif (pembebanan) ini berimplikasi pada banyak hal. Dalam disiplin fiqih –meskipun ekonomi sendiri bukan merupakan komponen fiqih- ikhtiar dalam arti luas disinggung karena erat kaitannya dengan usaha ekonomi. Kita mengenal pasal-pasal muamalah sebagai modifikasi perekonomian secara lengkap dan terinci. Berpangkal dari keberadaan manusia sebagai obyek ekonomi (produsen dan juga konsumen) maka kecuali upaya pembenahan sistem ekonomi, seperti peningkatan partisipasi modal swasta, hal yang tak kalah pentingnya adalah menggarap ketrampilan dan daya kemampuan pelaku ekonomi, yang berkaitan dengan usaha atau ikhtiar manusia.

Menyinggung perihal ikhtiar dalam perekonomian, kita ingat sebuah hadits

yang kurang lebih artinya, “Bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah wajib (fardhu) setelah kewajiban yang lain.” Interpretasi hadits ini akan melahirkan kelompok-kelompok manusia produktif atau manusia yang bersumber daya tinggi yang sekaligus merupakan inti perekonomian. Barangkali dari kenyataan bahwa Allah tidak memberi rizqi dalam bentuk jadi dan siap digunakan, melainkan hanya dipersiapkan sebagai sarana dan sumber daya alam, maka sudah barang tentu untuk mengolahnya, mengikhtiar dalam bentuk industri, dan lain-lain.

Dari hadits ini, kita bisa menemukan pandangan yang proporsional terhadap ekonomi. Sikap ikhtiar dapat menghindarkan manusia dari sikap fatalistik (berserah pada nasib) yang secara tegas telah dilarang oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 87: “Janganlah kamu sekalian terputus asa atas rahmat Allah. Tiada yang berputus asa kecuali orang-orang kafir”.

b. Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Konsep tentang peran santri dalam pemberdayaan ekonomi sangat menarik dibahas, karena santri yang setiap harinya disibukkan dengan berbagai aktivitas belajar atau mengaji, ternyata juga memiliki aktivitas ekonomi. Pada pesantren tertentu, santri memang dibekali dengan berbagai ketrampilan / keahlian di bidang ekonomi seperti koperasi, kerajinan dan berdagang. Semua itu dilakukan oleh pihak pesantren sebagai upaya untuk membekali para santri dengan berbagai skill keahlian atau setidaknya menyiapkan mental dan ketrampilan para santri supaya kelak ketika keluar dari pesantren sudah bisa mandiri. Oleh karena itu wajar jika pesantren berusaha mengembangkan diri dengan melakukan suatu tindakan nyata (dakwah bil hal) pada masyarakat di sekitar pesantren di segala bidang, termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi ummat.

Untuk melangkah pada Program pembangunan yang berbasis pemberdayaan ekonomi ummat, paling tidak pesantren harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut: (a) kegiatan yang dilaksanakan harus terarah dan menguntungkan pesantren dan masyarakat sekitar terutama masyarakat yang lemah, (b) pelaksanaannya dilakukan oleh pesantren dan masyarakat sendiri, (c) karena pesantren dan masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kurang berdaya, maka upaya pemberdayaan ekonomi pesantren menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (cooperatif) dalam kelompok yang spesifik terkait dengan unit-unit usaha yang bisa diberdayakan kaum santri, (d) menggerakkan partisipasi masyarakat sekitar untuk saling membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial. Dalam hal ini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju.

Ada beberapa pesantren yang mencoba membuat satu ikhtiar menambah kemampuan santri di bidang wira usaha atau ekonomi. Berangkat dari kesadaran bahwa tidak semua santri akan menjadi ulama, maka beberapa pesantren mencoba membekali santri dengan ketrampilan di bidang pengembangan ekonomi. Artinya santri yang dihasilkan diharapkan mempunyai pengalaman dan syukur keahlian praktis tertentu yang nantinya dijadikan modal untuk mencari pendapatan hidup sekeluar dari pesantren. Kalau mencermati prilaku ekonomi di lingkungan pesantren pada umumnya, kita dapat menerka kemungkinan model apa yang sedang berjalan dalam usaha usaha tersebut. Setidaknya ada empat macam kemungkinan pola usaha ekonomi di lingkungan pesantren;

Pertama, usaha ekonomi yang berpusat pada kyai sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan pesantren. Misalnya seorang kyai mempunyai perkebunan cengkih yang luas. Untuk pemeliharaan dan pemanenan, kyai melibatkan santri-santrinya untuk mengerjakannya. Maka terjadilah hubungan mutualisme saling menguntungkan: kyai dapat memproduksi perkebunannya, santri mempunyai pendapat tambahan, dan ujungnya dengan keuntungan yang dihasilkan dari perkebunan cengkeh maka

kyai dapat menghidupi kebutuhan pengembangan pesantrennya. seperti kasus di Pandeglang, yaitu pesantren Nurul Hidayah Cilaja kec. Pandeglang.

Kedua, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren. Contohnya, pesantren memiliki unit usaha produktif seperti menyewakan gedung pertemuan, rumah dsb. Dari keuntungan usaha-usaha produktif ini pesantren mampu membiayai dirinya, sehingga seluruh biaya operasional pesantren dapat ditalangi oleh usaha ekonomi ini. Seperti pesantren Sidogiri yang mempunyai beberapa usaha seperti swalayan, toko-toko kelontong yang hasilnya untuk pembiayaan pesantren.

Ketiga, usaha ekonomi untuk santri dengan memberi ketrampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak ketrampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. Pesantren membuat program pendidikan sedemikian rupa yang berkaitan dengan usaha ekonomi seperti pertanian dan peternakan. Tujuannya semata-mata untuk membekali santri agar mempunyai ketrampilan tambahan, dengan harapan menjadi bekal dan alat untuk mencari pendapatan hidup. Pesantren Baitul Hamdi di Menes Pandeglang dapat dijadikan sampel pesantren dalam jenis ini juga, karena disana santri diajak untuk bertani, dan berkebun.

Keempat, usaha ekonomi bagi para alumni santri. Pengurus pesantren dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni, syukur bagi nanti keuntungan selebihnya dapat digunakan untuk mengembangkan pesantren. Prioritas utama tetap untuk pemberdayaan para alumni santri. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dan pesantren Maslakul Huda di Kajen Pati Jawa Tengah. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pesantren setidaknya memiliki tiga motif, yaitu :

Pertama, motif keagamaan, karena kemiskinan bertentangan dengan etika sosial ekonomi Islam.

Kedua, motif sosial, karena kyai juga seorang pemimpin yang harus mengatasi krisis ekonomi setempat.

Ketiga, motif politik, karena pemegang kekuasaan setempat mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi pada tingkat mikro dan makro. Pondok pesantren dalam fungsinya melayani masyarakat, dapat pula dilihat dari upayanya dalam melayani masyarakat, terutama kebutuhan untuk menanggapi persoalan-persoalan kemiskinan, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat dan sebagainya.). Di sinilah bisa ditunjukkan betapa pentingnya kehadiran pesantren yang tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan masyarakat sekitar lebih mendapat tempat dalam kerangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

Hal ini penting untuk dipahami karena pesantren secara historis didirikan dari dan untuk masyarakat. Pesantren didirikan dengan tujuan mengadakan transformasi sosial bagi (masyarakat) daerah sekitarnya. Ia hadir mengabdikan dirinya mengembangkan dakwah Islam dalam pengertian luas, mengembangkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan pada gilirannya didukung secara penuh oleh mereka.

Aspek lain signifikansi pelibatan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, berpeluang pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas terdiri dari komunitas muslim pada umumnya berada di daerah pedesaan. Pada sisi itu, pesantren yang memang berkembang dan tersebar di daerah-daerah pedesaan sampai derajat tertentu, merupakan representasi dari masyarakat muslim daerah-daerah pedesaan.

Kenyataan itulah yang membuat pesantren sampai saat ini masih berpengaruh pada

hampir seluruh aspek kehidupan di kalangan masyarakat muslim pedesaan yang taat. Tetapi upaya untuk menuju ke arah pemberdayaan masyarakat melalui fungsi ekonomi pesantren terkadang dibenturkan dengan berbagai kenyataan yang bisa menjadi penghambat langkah tersebut. Salah satu contohnya adalah karena biasanya pesantren selalu menjadi tempat bagi keluarga dekat kiai, yang bisa berupa anak, cucu dan seterusnya atau biasa disebut dzurriyyah kiai. Mereka kadang bertumpu secara ekonomis terhadap santri, apakah dalam bentuk penyediaan makanan, bahan kebutuhan sehari-hari, atau yang lainnya.

Di banyak pesantren selalu terdapat kios-kios kecil milik keluarga kiai yang terkadang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Inilah sulitnya ketika pesantren kemudian mencoba untuk memusatkan kegiatan ekonomi dalam satu lembaga. Kegagalan koperasi Pondok pesantren pada dasarnya adalah karena usaha itu dihadang oleh kepentingan-kepentingan internal. Selain itu harus diakui bahwa manajemen ekonomi pesantren juga relatif kurang baik, bukan dari aspek kejujurannya tapi administrasinya.

Selain itu kekurangan juga kerap tumbuh pada persoalan yang bersifat paradigmatis. Satu contoh misalnya nilai-nilai kemandirian yang dianut pesantren masih lebih menampakkan aspeknya yang bersifat individual, atau sangat lokal dan belum menjadi sikap sosial kemasyarakatan yang transformatif. Persoalan itu ditambah dengan pemaknaan sebagian pesantren terhadap pengabdian dan pengembangan masyarakat yang masih terkesan parsial dan melulu ditekankan pada aspek pengembangan keilmuan keagamaan murni. Sebagai konsekuensi pemberdayaan masyarakat di kalangan pesantren belum disentuh secara kreatif dan serius dalam bentuk penyatuan yang integral dan eksplisit ke dalam kurikulum yang dikembangkan pesantren. Tradisi itu tidak cukup dalam dirinya sendiri untuk memetamorfosis sebagai nilai civil society

yang berkeadaban, universal dan berorientasi jauh ke depan.

Untuk menambal kekurangan tersebut, maka yang harus diperhatikan dalam penguatan kelembagaan itu antara lain adalah,

Pertama, menganalisis kebutuhan subjek sasaran ekonomi atau yang disebut sebagai need-assessment. Analisis kebutuhan diperlukan agar apa yang akan dipasarkan itu memang menjadi kebutuhan sasaran. Pada tahap awal tentunya harus dibidik kebutuhan-kebutuhan santri dan masyarakat sekitar, agar produk yang ditawarkan akan segera diperoleh nilai imbal balik. Baru bisa bergerak ke sektor yang lain, jika kondisi memang sudah memungkinkan.

Kedua, melakukan analisis potensi SDM untuk kegiatan (ekonomi) tersebut.

Apakah sudah ada SDM yang bisa dan mampu untuk menjadi agen bagi pengembangan kelembagaan ekonomi pesantren tersebut? Pesantren sesungguhnya kaya dengan SDM yang berkualitas, hanya saja belum disentuh dengan kekuatan maksimal untuk itu.

Ketiga, memetakan kebutuhan dan potensi untuk dijadikan sebagai rancangan program yang memadai.

Keempat, melaksanakan program dengan memperhatikan jaringan kerja atau networking yang telah dimiliki oleh pesantren.

Kelima, melakukan evaluasi kinerja apakah sudah ada kemajuan atau belum. Strategi tersebut sebenarnya bisa diwujudkan dalam berbagai ranah. Karena pesantren pada umumnya berada di daerah pedesaan, maka strategi yang tepat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat haruslah tidak jauh dari bidang tersebut. Sunyoto Usman memberikan beberapa alternatif wilayah yang bisa menjadi wilayah garapan pesantren dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dikembangkan beberapa pendekatan yang

memungkinkan bisa diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, yaitu

- (1) Upaya pemberdayaan ekonomi pesantren harus terarah kepada pesantren yang benar-benar membutuhkan dan masyarakat di sekitarnya banyak yang miskin atau lemah,
- (2) Pendekatan kelompok unit usaha untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi bersama-sama,
- (3) Pendampingan kepada mereka selama proses pemberdayaan yang dilakukan dengan pembentukan kelompok yang dilakukan oleh pendamping yang sifatnya lokal, teknis dan khusus.

Karena sebenarnya pendidikan wirausaha bukanlah sesuatu yang asing dalam pesantren. Terutama tentang konsekuensi dari pendidikan semacam itu yaitu etos kerja keras. Hal semacam itu selalu menjadi tekanan pokok dalam pendidikan di pesantren. Akan tetapi pendidikan kepengusahaan (wirausaha) tersebut tidak terkoordinir dan tidak direncanakan dan untuk itu mestinya harus dibuat kerangkanya. Akibatnya akan keluar usahawan-usahawan yang mencari-cari jalan sendiri. Mereka akan menjadi usahawan-usahawan yang otodidak, yang tidak mendekati masalahnya dari segi-segi ilmiah tetapi berdasarkan intuisi. Dan akhirnya ini juga ada upaya memasukkan pendidikan keterampilan ke dalam pesantren. Usaha semacam itu adalah usaha yang terpuji dan bukanlah suatu yang buruk dalam dirinya.

Dalam diri santri sudah mulai ditanamkan kesadaran dan keinginan mengubah kehidupan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja berdasarkan suatu pandangan agama, baik di bidang pertanian, kelautan, produksi, pasar modal, koperasi maupun usaha kecil. Namun harus ada kerangka yang jelas yang mendukung ke arah sana, setidaknya ada konsep yang jelas sehingga bisa diukur letak keberhasilan dan kegagalannya. Kerangka itulah yang diharapkan bisa menumbuhkan sikap

jiwanya. Walaupun secara jujur wacana diskursus ekonomi, termasuk bisnis, dan sejenisnya, tidak pernah menjadi topik dalam pengajian atau bahkan dalam dakwah. Dan masih banyak lagi perilaku para muballigh dan pemikir Islam yang pada intinya menyudutkan dan meremehkan aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, wajar kalau kini umat Islam secara keseluruhan lebih miskin dan terbelakang ketimbang non-muslim. Umat Islam pada umumnya pemalas dan pendidikan mereka umumnya masih rendah. Kenyataan keterbelakangan, kemalasan, kebodohan dan kemiskinan di mayoritas umat Islam adalah hasil dan produk pemahaman dan pemaknaan ajaran Islam dan sekaligus prakteknya. Ini yang harus direformasi atau bahkan perlu ada upaya radikal dan mendasar (revolusi) untuk memahami Islam dan sekaligus mengamalkannya.

Seharusnya, ajaran ideal Islam itulah yang dijadikan tolak ukur kehidupan umatnya. Untuk membicarakan Islam realita yang lebih terurai, Azizi mengemukakan tiga hal; (1) salah paham yang berarti menjadikan salah pengamalan ajaran atau perbuatan yang keliru (tidak sesuai dengan ajaran Islam); (2) salah penggunaan dalil, yang seharusnya tidak dipakai; dan (3) ajaran yang tidak/kurang dikembangkan oleh para pemikirnya. Keduanya ini sangat berpengaruh negatif terhadap keberadaan ekonomi umat Islam.

2. Pengembangan Dana dan Sumber Dana Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang didirikan dan dikelola oleh kyai/yayasan dengan sumber pembiayaan dari pesantren sendiri, uang bulanan syahriyah santri dan bantuan masyarakat dalam bentuk zakat, shodaqoh, infaq serta sedikit hiba dan waqaf. Oleh karena itu pondok pesantren merupakan praktik pendidikan berbasis masyarakat (community based education). Walaupun demikian pembiayaan pondok pesantren bisa didapatkan dari dana hibah yang berasal dari pemerintah, misalnya dari kementerian Agama.

Secara garis besar penggunaan dana atau pembiayaan pendidikan di pondok pesantren dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pengeluaran operasional (revenue expenditure), yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk semua kegiatan yang mendukung proses kegiatan mengajar, gaji guru dan dewan pengurus pondok, penyusutan aktiva tetap, biaya listrik dan telepon,
- 2) Pengeluaran modal (capital expenditure) merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai barang modal aktiva tetap seperti membeli tanah, membangun lokal pesantren atau sekolah dan membeli peralatan perlengkapan pendidikan.

Sulistiorini menguraikan bahwa hal-hal yang berpengaruh terhadap dana pendidikan terutama dalam pembiayaan pendidikan tidak pernah tetap dan akan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Secara garis besar perubahan pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh: 1) Berkembangnya demokrasi pendidikan, 2) Kebijakan pemerintah, 3) Tuntutan akan pendidikan, 4) Adanya inflasi, sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh: 1) Tujuan pendidikan, 2) Pendekatan yang digunakan, 3) Materi yang disajikan, 4) Tingkat dan jenis pendidikan.

Anwar mengemukakan terdapat empat persoalan pendanaan pendidikan, yaitu: 1) Kemampuan manajemen, 2) Peningkatan kualitas, 3) Kesyukuran, dan 4) Akuntabilitas. Adapun solusi yang lain agar manajemen pesantren menjadi lebih berkembang perlu menerapkan antara lain: 1) Menerapkan manajemen secara profesional, 2) Menerapkan kepemimpinan kolektif, 3) Menerapkan demokratisasi kepemimpinan, 4) Menerapkan manajemen struktur, 5) Menanamkan sosio-egalitarianisme, 6) Menghindarkan

pemahaman yang tidak mensucikan agama, 7) Memperkuat penguasaan epistemologi dan metodologi, 8) Mengembangkan sentra- sentra perekonomian, 9) Mengadakan pembaruan secara kesyukuran.

Umaedi menyatakan bahwa langkah yang ditempuh adalah pimpinan lembaga pendidikan harus mempunyai jiwa kewiraswastaan, yaitu mampu bersikap, berperilaku, memimpin dan mengelola dengan selalu mencari dan menerapkan cara kerja dan teknologi baru sehingga dicapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Setidaknya sumber dana pondok pesantren yang berasal dari partisipasi masyarakat antara lain: 1) Dewan pendidikan, 2) Komite sekolah, 3) Persatuan orang tua siswa, 4) Perkumpulan olah raga, 5) Perkumpulan kesenian, 6) Organisasi-organisasi lain. Sedangkan bidang partisipasi antara lain: (1) Kurikulum lokal, (2) Alat-alat belajar, (3) Dana, (4) Material atau bangunan, (5) Auditing keuangan, (6) Mengawasi kegiatan-kegiatan sekolah. Adapun cara berpartisipasi: (1) Ikut dalam pertemuan, (2) Datang ke sekolah, (3) Lewat surat, (4) Lewat telepon, (5) Ikut malam seni, (6) Ikut bazar.

Permasalahan dana dalam lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren, menurut Manfred Oepen dapat diatasi dengan cara: 1) mengadopsi manajemen modern, 2) membuat wirausaha, 3) melakukan pelatihan kewirausahaan, 4) membuat network ekonomi, 5) Teknologi Tepat Guna (TTG), perkoprasian (pre cooperative movement), dan pengembangan industri kecil (small bussines development) yang dapat meningkatkan pendapatan (income generating program).

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan pondok pesantren menurut Sulthon adalah sebagai berikut: 1) Menyusun Rencana Sumber Atau Target Penerimaan dan Pendapatan Pesantren dalam Satu Tahun, 2) Menyusun Rencana Penggunaan Keuangan dalam Satu Tahun.

Depag menyatakan bahwa sumber dana pendidikan dapat digali dari dua sumber, yaitu dana yang berasal dari lembaga pendidikan (pesantren) itu sendiri, intern, seperti SPP atau syahriyah, uang pendaftaran santri, uang gedung, bunga deposito koperasi pesantren dan usaha mandiri (wiraswasata), dan dana berasal dari luar lembaga, ekstern, seperti sumbangan dari yayasan, masyarakat, pinjaman bank, hibah dan wakaf, sumbangan alumni, donatur dan zakat serta shodaqoh.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dana pondok pesantren adalah sejumlah dana yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan yang berasal dari masyarakat (donatur) atau pemerintah. Pada umumnya pembiayaan pondok pesantren yang diberikan oleh masyarakat yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap perjalanan dan pengembangan pendidikan di pondok pesantren biasanya dana berupa shodaqoh, hibah, dan lain-lain.

Sedangkan dari pemerintah merupakan wujud dari anggaran yang telah ditentukan dalam APBD (Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah) pada tingkat kabupaten atau APBN (Anggaran Belanja dan Pendapatan Nasional) pada tingkat Nasional. Pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan dan sosial memerlukan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan dana dan sumber dana agar dapat eksis tanpa menggantungkan diri kepada masyarakat atau lembaga lain. Oleh karena itu Kyai sebagai manajer harus melakukan inovasi terutama dalam pendanaan dan pengembangan dari dana yang diperoleh tersebut. Karena hakikat dari penerapan otonomi pendidikan adalah kemandirian lembaga pendidikan tidak hanya dalam pembelajaran tetapi juga dalam pendanaan pendidikan.

Manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif dan efisien maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Lebih spesifik, Depag

memberi arahan bahwa pondok pesantren dengan segala potensi yang dimilikinya dapat mengembangkan dana dan sumber dana dengan macam-macam usaha yang dapat didirikan dalam rangka menunjang dana operasional pondok pesantren. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Bidang perdagangan, 2) Bidang petanian dan agrobisnis, 3) Bidang industri kecil, 4) Bidang elektronika dan perbengkelan, 5) Bidang pertukangan kayu dan mebel, 6) Bidang keuangan/ lembaga keuangan 7) Bidang koperasi, 8) Bidang teknologi tepat guna 4) Bidang perikanan, dan 9) Bidang pelayanan Jasa.

Lebih rinci Amin Haidari menjelaskan bahwa bantuan dan sumbangan dana masyarakat dapat dilaksanakan dalam wujud: 1) melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan program pesantren, 2) menampung gagasan dan pendapat masyarakat, 3) menerima bantuan yang tidak mengikat, zakat infaq shodaqoh, hibah dan waqaf, 4) membangun kerjasama yang bersinergi dan saling menguntungkan dengan masyarakat khususnya di lingkungan pesantren, 5) memberikan kesempatan kepada masyarakat di lingkungan pesantren untuk membuka usaha pelayanan santri, 6) membina masyarakat untuk kepentingan pembinaan santri, 7) kerjasama dalam bidang pertanian, perkoperasian, keterampilan, 8) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan pesantren dalam wujud: a) memberi kesempatan untuk memanfaatkan program dan sarana pesantren seperti masjid, majlis ta'lim pesantren, b) membina masyarakat, membuat dan menilai laporan kemajuan pesantren (yang menerapkan manajemen terbuka), c) menjadikan pesantren sebagai pusat belajar (learning society).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber dana dan pengembangan dana pondok pesantren memiliki potensi yang besar dalam memperkuat perekonomian sehingga dana yang telah terhimpun dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kekhasan pondok pesantren.

3. Prospek Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren Masa Kini

Pesantren telah memberikan tanggapan positif terhadap pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dengan didirikannya sekolah-sekolah umum maupun madrasah-madrasah di lingkungan pesantren membuat pesantren kaya diverifikasi lembaga pendidikan dan peningkatan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional.

Pemerintah memberikan wewenang penuh kepada Departemen Agama (Kementerian Agama) Republik Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di Madrasah dan Pondok Pesantren, baik dalam hal pembiayaan, pengadaan dan pengembangan sumberdaya manusia. Pengembangan kelembagaan dan sarana, serta peningkatan mutu lembaga pendidikan agama tersebut.

Pemerintah memiliki perhatian melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan eksistensi pesantren dalam pasal 26, sebagai berikut:

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
- (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

menengah, dan/atau pendidikan tinggi.

- (3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam ayat (3) ini memberikan pengakuan terhadap alumni pesantren untuk menjadi pendidik dalam mengajarkan ilmu agama pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan setelah mendapat pengakuan melalui uji kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan terhadap ini tentu melalui pengakuan surat bukti menamatkan pendidikan di pesantren atau ijazah/syahadah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam mengeluarkan surat edaran tentang legalisasi ijazah pesantren. Salah satu butir isi surat edaran ini adalah tentang mata pelajaran yang harus dipenuhi pesantren agar ijazah lembaga pendidikan ini diakui keabsahannya. Surat edaran ini menjadi petunjuk teknis (*juknis*) bagi pesantren tentang tatacara pemberian sertifikat/ijazah bagi para santri yang menamatkan pendidikannya di pesantren. Mata Pelajaran yang harus dipenuhi pesantren untuk legalisasi ijazah, yaitu tingkat Ibtidaiyah meliputi: Al-Qur'an, Tauhid, Fiqih, Akhlak, Nahwu, Sharaf, serta Pelajaran pendukung lain. Tingkat Tsanawiyah meliputi: Al-Qur'an, Tauhid, Fiqih, Akhlak, Nahwu, Sharaf, Tarikh, Tajwid, serta Pelajaran pendukung lain. Tingkat Aliyah meliputi Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadis, Ilmu Hadis, Fiqih, Ushul Fiqih, Tauhid, Nahwu, Sharaf, Tarikh, Balaghah, serta Pelajaran pendukung lain.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan bangunan fisik atau sarana pendidikan yang dimiliki, pesantren mempunyai lima tipe berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki pesantren itu sendiri. Sedangkan berdasarkan kurikulum, pesantren terbagi tiga, yaitu pesantren tradisional (salafiyah), pesantren modern (khalaf atau asriyah) dan pesantren komprehensif (kombinasi). Pesantren memiliki lima unsur atau elemen, yaitu masjid, kyai, pondok, santri, dan pengajian kitab kuning (tafaqquh fi al-din).
2. Pemerintah telah memberikan porsi yang sama antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pesantren pada masa sekarang diharapkan menjadi agen perubahan (agent of change) sebagai lembaga perantara yang diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator dan katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang, serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong era global.
3. Anggaran penerimaan atau sumber dana menjadi masalah yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan karena hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Secara umum manajemen pembiayaannya sudah memenuhi standar lembaga pendidikan. Hanya saja karena tidak ada patokan baku yang berlaku secara umum pada lembaga pesantren, standar kecukupan atau ketidak cukupan khusus pesantren tidak dapat diketahui. Apalagi secara riil sistem pendidikan dan siklus kehidupan di pesantren berbeda dengan lembaga formal lainnya.
4. Terdapat empat persoalan pendanaan pendidikan, yaitu: 1) Kemampuan manajemen, 2) Peningkatan kualitas, 3) Kestinambungan, dan 4) Akuntabilitas. Adapun solusi yang lain agar manajemen pesantren menjadi lebih berkembang perlu menerapkan antara lain: 1) manajemen secara profesional, 2) kepemimpinan yang kolektif, 3) demokratisasi kepemimpinan, 4) manajemen struktur, 5) sosio-egalitarianisme, 6) pemahaman yang mensucikan agama, 7) penguasaan epistemologi dan metodologi, 8) sentra-sentra perekonomian, 9) pembaruan secara kestinambungan.
5. Permasalahan dana dalam lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren, dapat diselesaikan dengan cara: 1) mengadopsi manajemen modern, 2) membuat wirausaha, 3) melakukan pelatihan kewirausahaan, 4) membuat network ekonomi, 5) Teknologi Tepat Guna (TTG), perkoperasian (pre cooperative movement), dan pengembangan industri kecil (small bussines development) yang dapat meningkatkan pendapatan (income generating program).
6. Pesantren sebagai lembaga yang hidup di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, baik yang terkait dengan persoalan keagamaan (moral force) maupun yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Untuk melakukan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pesantren.
 - a. Mempersiapkan para santri dengan memberikan bekal keahlian-keahlian tertentu, seperti pertanian, cara berdagang, bengkel dan lain sebagainya sehingga ketika mereka keluar dari pesantren mempunyai bekal untuk bekerja.

- b. Menanamkan jiwa wira usaha pada santri, dengan memberikan wawasan kepada mereka sejak dini bahwa bekerja merupakan perintah agama. Karena mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga merupakan bagian yang tak terpisah dari ajaran Agama.
- c. Perlu adanya pemahaman dari kalangan pesantren bahwa persoalan sosial di masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, juga merupakan tanggung jawab pesantren sebagai bagian dari

hablum min al anas dan dakwah bil hal.

DAFTAR PUSTAKA

- http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/418/pdf_33
<https://www.perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/47/36>
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/tasyri/article/view/3176/2252>
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/13339/8277>
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/785/696>